

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)**

Nota Dinas

Nomor : 15903/Ses.1/06/2024

Yth. : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dari : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Mei 2024
Tanggal : 20 Juni 2024

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode bulan Mei tahun 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp244.786.416.000 dan sampai dengan bulan Mei 2024 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp66.212.923.842 (27,05%). Dari pagu anggaran tersebut, pagu pengadaan LKPP sebesar Rp190.987.837.000 (78,02%).
2. Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP, anggaran belanja pengadaan LKPP sebesar Rp 190.987.837.000,- dengan jumlah penayangan pada aplikasi SiRUP adalah sebesar Rp190.760.968.000 atau sebesar 99,88%. Terdapat Selisih pagu pengadaan dengan penayangan pada aplikasi SiRUP adalah sebesar -Rp226.869.000.
3. Dari paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP, 29,82% direncanakan dilaksanakan melalui Swakelola dan 70,18% belanja pengadaan direncanakan dilaksanakan melalui Penyedia. Pada alokasi belanja pengadaan melalui Penyedia pada RUP LKPP terdiri atas:
 - a. Rencana belanja pengadaan dengan tagging PDN mencapai 92,59%; dan
 - b. Rencana belanja pengadaan dengan tagging UMKK sebesar 56,88%.
4. Pada capaian kinerja fisik, LKPP memiliki 4 Indikator Sasaran Strategis (rata-rata progres 40,39%), 14 Indikator Sasaran Program (rata-rata progres 38,52%), 61 Indikator Sasaran Kegiatan (rata-rata progres 40,57%), 70 Rincian Output (rata-rata progres 40,11%), dan 187 Komponen (rata-rata progres 40,16%).
5. Terdapat indikator yang realisasinya telah melebihi target, yaitu:
 - a. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik
 - b. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-purchasing dengan sistem lainnya
 - c. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing
 - d. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda
 - e. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK
 - f. Indikator Rincian Output - SDM JF PPBJ
6. Berkaitan dengan hal-hal diatas, untuk meningkatkan kinerja dan anggaran LKPP diharapkan setiap Unit Organisasi agar:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun unit organisasi masing-masing karena akan mempengaruhi nilai IKPA di tingkat lembaga;
 - b. Merencanakan dan mengupayakan percepatan kegiatan serta proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan II minimal sebesar 49,2% dapat tercapai;
 - c. Mencermati dan segera meng-update pengumuman RUP di SiRUP bagi unit organisasi yang penayangan RUP pada aplikasi SiRUP belum sesuai dengan anggaran belanja pengadaannya;
 - d. Meningkatkan realisasi penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah agar paket pengaadaan yang telah direncanakan dengan tagging PDN dapat terealisasi



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

seluruhnya;

- e. Mencermati administrasi dan pelaporan setiap kegiatan pengadaan barang/jasa khususnya yang menggunakan PDN agar dicatatkan pada aplikasi SAKTI;
 - f. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk memastikan paket pengadaan barang/jasa yang sudah diumumkan dapat segera diproses;
 - g. Memonitor dan memastikan capaian setiap indikator kinerja unit organisasi masing-masing (Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Rincian Output dan komponen);
 - h. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiREMON sebagai media pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap progres serta pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran pada unit organisasinya masing-masing;
 - i. Menindaklanjuti rekomendasi unit organisasi masing-masing yang terdapat pada Bab II Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Mei 2024 dan melaporkan progres tindaklanjut melalui Aplikasi SiREMON.
7. Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 dari Kementerian PAN-RB, setiap unit organisasi agar mengoptimalkan fitur pada aplikasi SiREMON dalam pemberian feedback atas rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

Dalam hal membutuhkan penjelasan dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Sdri. Resa Anggriani (0819-3209-6526). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Edi Kristiyanto

Tembusan :

1. Sekretaris Utama
2. Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3. Plt. Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital
4. Plt. Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
5. Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LAPORAN

Monitoring & Evaluasi Kinerja Unit Organisasi

Periode Bulan Mei

TAHUN
20
24

Biro Perencanaan dan Keuangan

Gedung LKPP Lt.9

Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, RT.2/RW.5, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta



www.lkpp.go.id



lkpp_ri



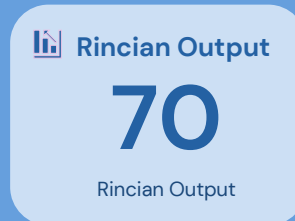
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah



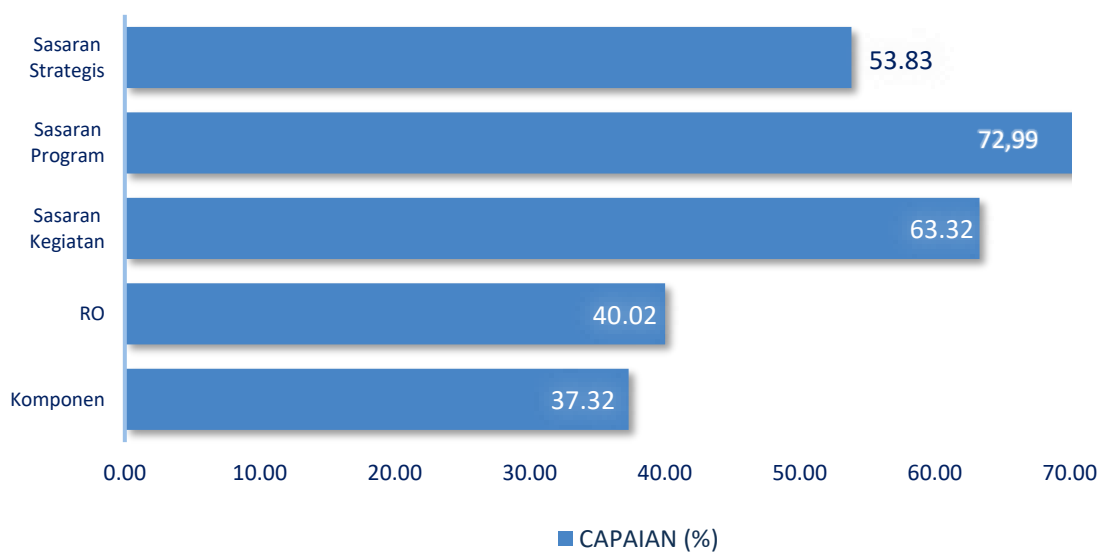
021-29935577
144

SUMMARY

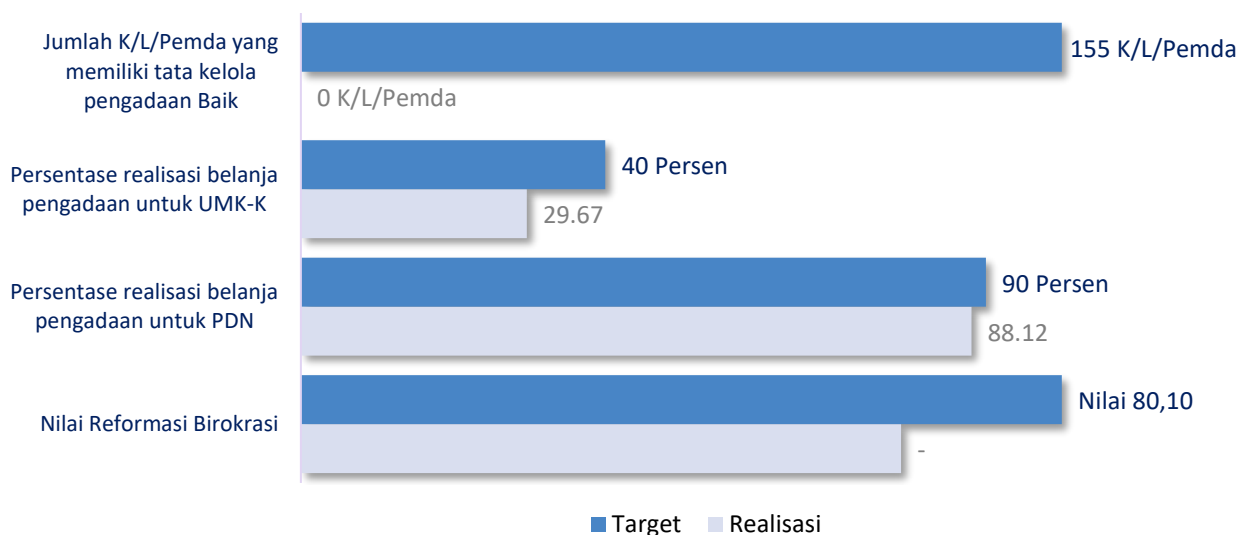
CAPAIAN FISIK LEMBAGA



Capaian Fisik



Sasaran Strategis



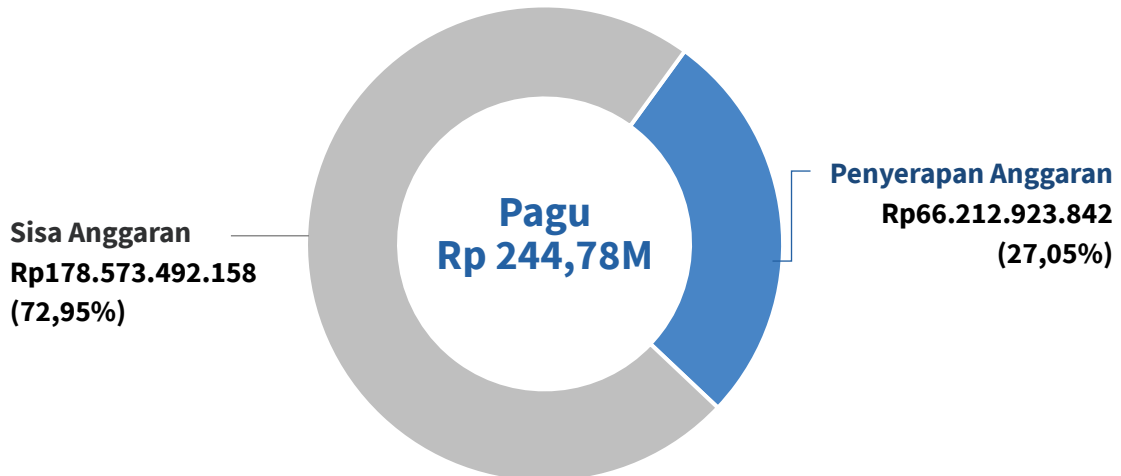
SUMMARY

Penyerapan Anggaran

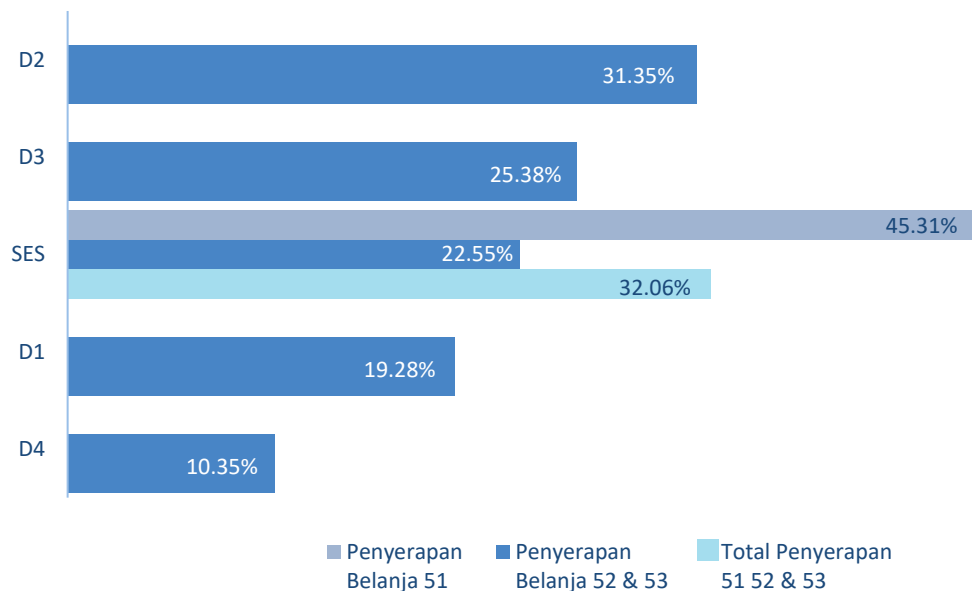


Realisasi Penyerapan Anggaran LKPP TA 2024 berdasarkan aplikasi MonSAKTI

Per tanggal 30 Mei 2024



Realisasi Penyerapan Anggaran Unit Organisasi Eselon I TA 2024 berdasarkan aplikasi MonSAKTI



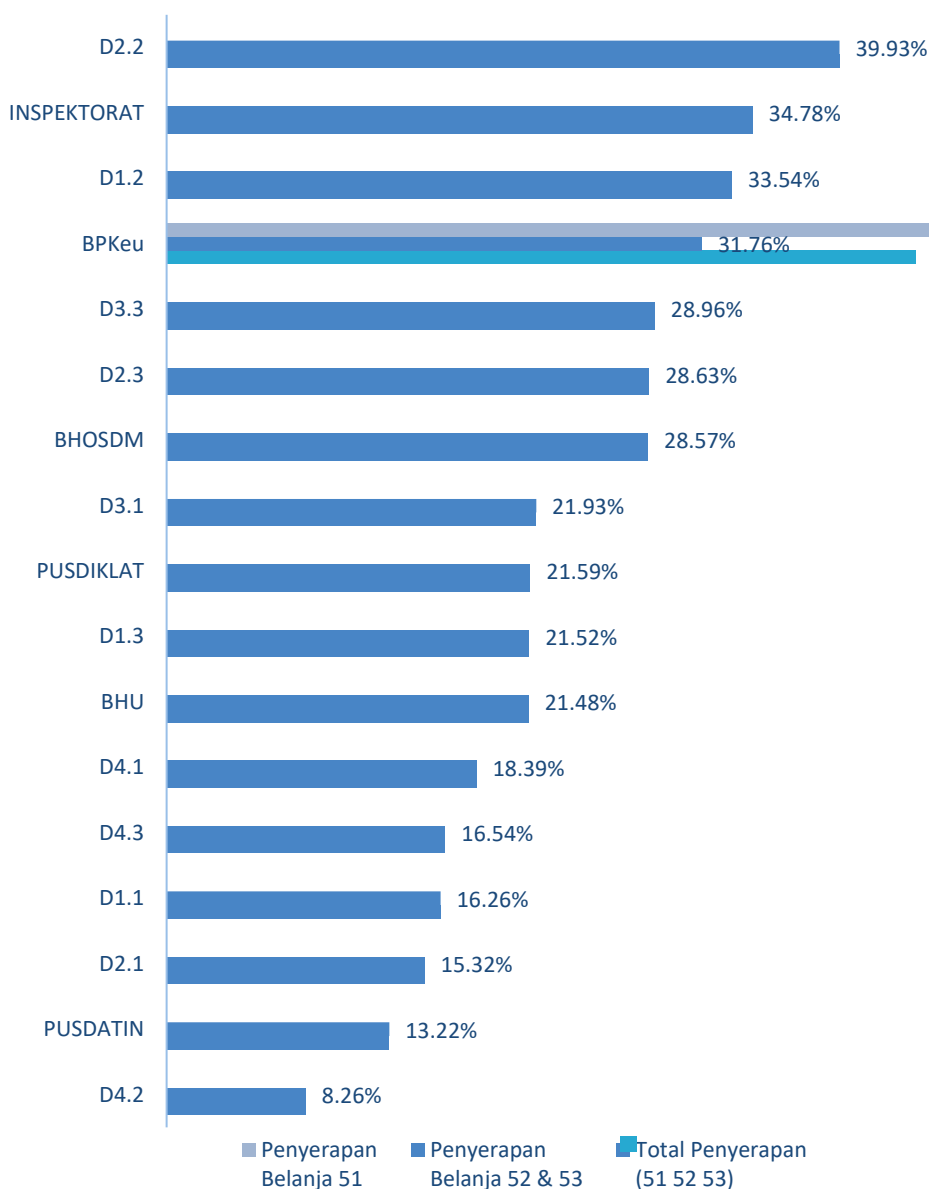
*Sumber: Aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan RI tanggal 30 Mei 2024

Sampai dengan 30 Mei 2024, berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I, didapatkan persentase realisasi penyerapan anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 **terbesar** terdapat pada Kedeputan Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital sebesar

Rp2.483.022.757 (31,35%) dan **terkecil** terdapat pada Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Rp347.810.540 (10,35%).



Realisasi Penyerapan Anggaran Per Unor Es. II



Sampai dengan Mei 2024, berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon II, didapatkan persentase realisasi penyerapan anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 **terbesar** terdapat pada Direktorat Sistem Pengadaan Digital sebesar Rp5.922.579.080 (39,93%) dan **terkecil** terdapat pada Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah sebesar Rp1.541.584.876 (8,26%).

Perbandingan Rencana Penarikan Dana (RPD) Dengan Realisasi Anggaran

No.	Unit Organisasi	RPD Mei (Rp)	Realisasi Anggaran Mei (Rp)	Deviasi (Rp)	% Deviasi*
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6 = (5 / 3)
1	BHOSDM	Rp376.390.908	Rp349.726.928	-Rp26.663.980	-7,08%
2	BHU	Rp3.037.008.172	Rp3.967.853.550	Rp930.845.378	30,65%
3	BPKEU	Rp402.283.558	Rp167.701.887	-Rp234.581.671	-58,31%
4	BPKEU (Belanja Pegawai)	Rp4.740.519.755	Rp4.632.772.431	-Rp107.747.324	-2,27%
5	D1.1	Rp1.307.067.000	Rp1.074.390.188	-Rp232.676.812	-17,80%
6	D1.2	Rp235.415.000	Rp277.144.913	Rp41.729.913	17,73%
7	D1.3	Rp2.227.458.783	Rp395.354.806	-Rp1.832.103.977	-82,25%
8	D2.1	Rp237.529.600	Rp294.840.000	Rp57.310.400	24,13%
9	D2.2	Rp378.108.955	Rp558.986.953	Rp180.877.998	47,84%
10	D2.3	Rp1.420.700.500	Rp1.142.820.741	-Rp277.879.759	-19,56%
11	D3.1	Rp216.577.779	Rp226.907.476	Rp10.329.697	4,77%
12	D3.3	Rp433.321.000	Rp350.163.856	-Rp83.157.144	-19,19%
13	D4.1	Rp732.464.000	Rp362.769.000	-Rp369.695.000	-50,47%
14	D4.2	Rp1.020.549.559	Rp916.564.414	-Rp103.985.145	-10,19%
15	D4.3	Rp80.285.228	Rp50.475.583	-Rp29.809.645	-37,13%
16	Inspektorat	Rp58.597.003	Rp33.270.017	-Rp25.326.986	-43,22%
17	PUSDATIN	Rp365.913.000	Rp787.741.174	Rp421.828.174	115,28%
18	PPSDM PBJ	Rp339.743.833	Rp164.620.072	-Rp175.123.761	-51,55%
TOTAL LKPP		Rp17.609.933.633	Rp15.754.103.989	-Rp1.855.829.644	-10,54%

Catatan:

- * 1. Ambang batas deviasi antara RPD dengan realisasi adalah sebesar $\pm 5\%$ untuk nilai maksimum IKPA LKPP;
 2. Kinerja Unit Organisasi semakin baik bila Persentase Deviasi antara RPD dengan Realisasi Anggaran mendekati 0%.
 3. Persentase Deviasi bernilai positif (+) jika Realisasi Anggaran lebih besar dari RPD
 4. Persentase Deviasi bernilai negatif (-) jika Realisasi Anggaran lebih kecil dari RPD
 5. RPD (3) dan Realisasi Anggaran (4) yang ditampilkan merupakan RPD dan penyerapan anggaran parsial bulan Mei tahun 2024
- Realisasi anggaran diluar ambang batas toleransi deviasi sebesar $\pm 5\%$
■ Realisasi anggaran masih dalam ambang batas toleransi deviasi sebesar $\pm 5\%$

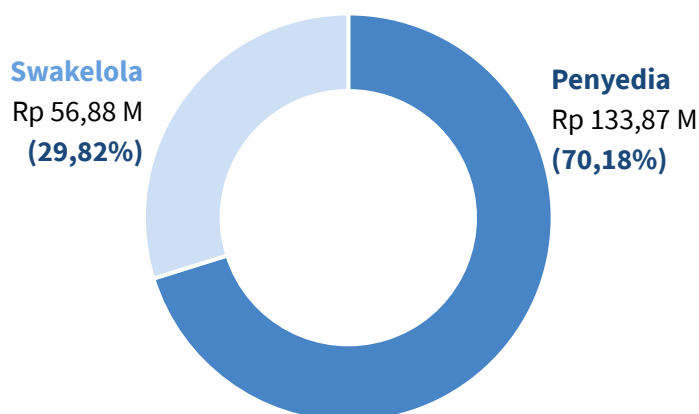
Rencana Umum Pengadaan LKPP

per Mei 2024

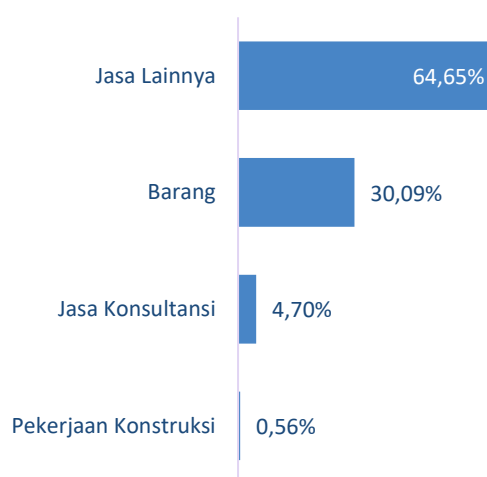
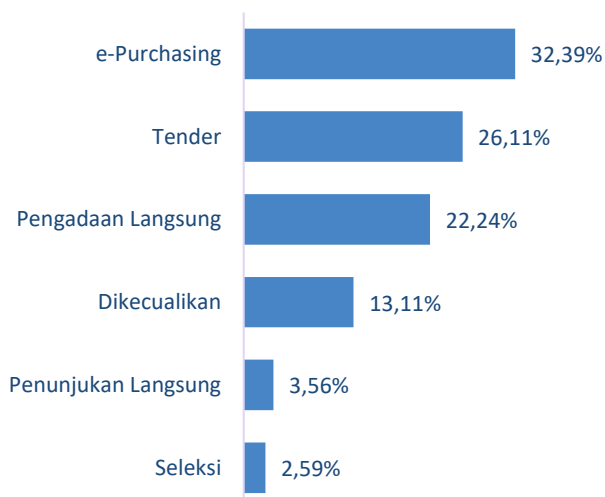
Pagu Pengadaan LKPP
Rp 190,987 M

Penayangan RUP LKPP
Rp 190,76M
(99,88%)

Penayangan RUP
Berdasarkan Cara Pengadaan



Penayangan RUP
Berdasarkan Metode Pemilihan



DAFTAR ISI

SUMMARY	2
DAFTAR ISI.....	7
BAB I	10
MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA	10
1.1 ANGGARAN	10
1.1.1 Pagu Anggaran	10
1.1.2 Penyerapan Anggaran.....	11
1.2 PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA	12
1.3 PELAPORAN EKSTERNAL.....	13
1.3.1 Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) SMART Kementerian Keuangan	13
1.3.2 Pelaporan Kinerja pada E-Monev BAPPENAS	14
BAB II	15
MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI	15
2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU).....	15
A. Capaian Kinerja Fisik.....	15
B. Capaian Kinerja Anggaran	16
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	16
D. Rekomendasi	16
2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)	17
A. Capaian Kinerja Fisik.....	17
B. Capaian Kinerja Anggaran	18
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	18
D. Rekomendasi	19
2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)	19
A. Capaian Kinerja Fisik.....	19
B. Capaian Kinerja Anggaran	20
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	21
D. Rekomendasi	21
2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)	22
A. Capaian Kinerja Fisik.....	22
B. Capaian Kinerja Anggaran	23
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	23
D. Rekomendasi	23
2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)....	24
A. Capaian Kinerja Fisik.....	24

B.	Capaian Kinerja Anggaran	25
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	25
D.	Rekomendasi	25
2.6	DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)	26
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	26
B.	Capaian Kinerja Anggaran	27
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	27
D.	Rekomendasi	28
2.7	DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)	29
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	29
B.	Capaian Kinerja Anggaran	30
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	30
D.	Rekomendasi	30
2.8	DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)	31
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	31
B.	Capaian Kinerja Anggaran	32
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	32
D.	Rekomendasi	33
2.9	DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)	34
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	34
B.	Capaian Kinerja Anggaran	35
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	36
D.	Rekomendasi	36
2.10	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)	38
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	38
B.	Capaian Kinerja Anggaran	38
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	39
D.	Rekomendasi	39
2.11	DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3).....	40
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	40
B.	Capaian Kinerja Anggaran	41
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	41
D.	Rekomendasi	41
2.12	DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1).....	42
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	42
B.	Capaian Kinerja Anggaran	43
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	43

D.	Rekomendasi	43
2.13	DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2)	44
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	44
B.	Capaian Kinerja Anggaran	45
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	45
D.	Rekomendasi	46
2.14	DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3)	48
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	48
B.	Capaian Kinerja Anggaran	49
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	49
D.	Rekomendasi	49
2.15	INSPEKTORAT	50
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	50
B.	Capaian Kinerja Anggaran	50
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	51
D.	Rekomendasi	51
2.16	PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA	52
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	52
B.	Capaian Kinerja Anggaran	53
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	53
D.	Rekomendasi	53
3.17	PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)	54
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	54
B.	Capaian Kinerja Anggaran	54
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	55
D.	Rekomendasi	55
BAB III		56
KESIMPULAN		56
A.	Kesimpulan.....	56

BAB I

MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA

1.1 ANGGARAN

1.1.1 Pagu Anggaran

Berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor: SP DIPA-DIPA-106.01-0/2024 tanggal 24 Januari 2024, pagu anggaran LKPP Tahun 2024 sebesar Rp244.786.416.000. Adapun komposisi anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
51 Belanja Pegawai	53.798.579.000	21.98%
52 Belanja Barang	167.782.128.000	68.54%
53 Belanja Modal	23.205.709.000	9.480%
TOTAL	244.786.416.000	100.00%

Adapun pembagian pagu anggaran tersebut ke Unit Organisasi adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	51 Belanja Pegawai (Rp)	52 Belanja Barang (Rp)	53 Belanja Modal (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
SETTAMA	53.798.579.000	55.515.411.000	19.411.512.000	74.926.923.000
BHOSDM	-	5.956.861.000	-	5.956.861.000
BPKeu	-	3.683.337.000	-	3.683.337.000
BHU	-	45.875.213.000	19.411.512.000	65.286.725.000
BPKeu (Belanja Pegawai)	53.798.579.000	-	-	53.798.579.000
Kedeputian 1 (D1)	-	31.625.133.000	-	31.625.133.000
D1.1	-	18.754.375.000	-	18.754.375.000
D1.2	-	2.318.730.000	-	2.318.730.000
D1.3	-	10.552.028.000	-	10.552.028.000
Kedeputian 2 (D2)	-	37.837.299.000	96.000.000	37.933.299.000
D2.1	-	4.831.489.000	-	4.831.489.000
D2.2	-	14.831.835.000	-	14.831.835.000
D2.3	-	18.173.975.000	96.000.000	18.269.975.000
Kedeputian 3 (D3)	-	7.789.260.000	-	7.789.260.000
D3.1	-	3.969.791.000	-	3.969.791.000
D3.3	-	3.819.469.000	-	3.819.469.000
Kedeputian 4 (D4)	-	23.994.341.000	-	23.994.341.000
D4.1	-	3.229.245.000	-	3.229.245.000
D4.2	-	18.663.984.000	-	18.663.984.000
D4.3	-	2.101.112.000	-	2.101.112.000
INSPEKTORAT	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000
PUSLAT	-	3.444.686.000	467.208.000	3.911.894.000
PUSDATIN	-	6.575.998.000	3.230.989.000	9.806.987.000
TOTAL	53.798.579.000	167.782.128.000	23.205.709.000	244.786.416.000

1.1.2 Penyerapan Anggaran

Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan 30 Mei 2024 penyerapan anggaran LKPP adalah sebesar Rp50.458.819.853 atau sebesar 20,61%. Adapun rincian penyerapan anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

- Penyerapan per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	53.798.579.000	24,377,917,315	45.31%	29,420,661,685
52 Belanja Barang	167.782.128.000	41,379,828,527	24.66%	126,402,299,473
53 Belanja Modal	23.205.709.000	455,178,000	1.96%	22,750,531,000
Total	244.786.416.000	66,212,923,842	27.05%	178,573,492,158

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
SES (Gaji)	53,798,579,000	24,377,917,315	45.31%	29,420,661,685
INSPEKTORAT	1,000,000,000	347,810,540	34.78%	652,189,460
D2	37,933,299,000	11,893,919,951	31.35%	26,039,379,049
D3	7,789,260,000	1,976,853,068	25.38%	5,812,406,932
SES	74,926,923,000	16,895,641,517	22.55%	58,031,281,483
PUSLAT	3,911,894,000	844,401,806	21.59%	3,067,492,194
D1	31,625,133,000	6,097,326,357	19.28%	25,527,806,643
PUSDATIN	9,806,987,000	1,296,030,531	13.22%	8,510,956,469
D4	23,994,341,000	2,483,022,757	10.35%	21,511,318,243
TOTAL	244,786,416,000	66,212,923,842	27.05%	178,573,492,158

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
BPKeu (Gaji)	53,798,579,000	24,377,917,315	45.31%	29,420,661,685
D2.2	14,831,835,000	5,922,579,080	39.93%	8,909,255,920
INSPEKTORAT	1,000,000,000	347,810,540	34.78%	652,189,460
D1.2	2,318,730,000	777,783,125	33.54%	1,540,946,875
BPKeu	3,683,337,000	1,169,928,770	31.76%	2,513,408,230
D3.3	3,819,469,000	1,106,306,272	28.96%	2,713,162,728
D2.3	18,269,975,000	5,231,176,010	28.63%	13,038,798,990

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi Nominal (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
BHOSDM	5,956,861,000	1,701,586,289	28.57%	4,255,274,711
D3.1	3,969,791,000	870,546,796	21.93%	3,099,244,204
PUSLAT	3,911,894,000	844,401,806	21.59%	3,067,492,194
D1.3	10,552,028,000	2,270,814,962	21.52%	8,281,213,038
BHU	65,286,725,000	14,024,126,458	21.48%	51,262,598,542
D4.1	3,229,245,000	593,876,389	18.39%	2,635,368,611
D4.3	2,101,112,000	347,561,492	16.54%	1,753,550,508
D1.1	18,754,375,000	3,048,728,270	16.26%	15,705,646,730
D2.1	4,831,489,000	740,164,861	15.32%	4,091,324,139
PUSDATIN	9,806,987,000	1,296,030,531	13.22%	8,510,956,469
D4.2	18,663,984,000	1,541,584,876	8.26%	17,122,399,124
TOTAL	244,786,416,000	66,212,923,842	27.05%	178,573,492,158

1.2 PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu pengadaan LKPP adalah sebesar 190.987.837.000 (78,02%) dari pagu total LKPP. Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar **Rp190.760.968.000** atau sebesar **99,88%** yang terdiri dari:

Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Total Pagu Paket (Rp)	%
Jasa Lainnya	641	Rp86,545,814,000	45.31%
Barang	390	Rp40,283,936,000	21.09%
Jasa Konsultansi	40	Rp6,297,756,000	3.30%
Pekerjaan Konstruksi	3	Rp749,998,000	0.39%
Swakelola	515	Rp56,883,464,000	29.78%
TOTAL	1589	Rp190,760,968,000	99.88%

Metode Pemilihan	Jumlah Paket	Total Pagu Paket (Rp)	%
e-Purchasing	343	Rp43,357,310,000	22.70%
Tender	7	Rp34,960,520,000	18.31%
Pengadaan Langsung	455	Rp29,779,336,000	15.59%
Dikecualikan	253	Rp17,551,802,000	9.19%
Seleksi	6	Rp4,767,740,000	2.50%
Penunjukan Langsung	10	Rp3,460,796,000	1.81%
Swakelola	515	Rp56,883,464,000	29.78%
TOTAL	1589	Rp190,760,968,000	99.88%

Adapun progres penayangan paket pengadaan barang/jasa per Unit Organisasi Eselon II adalah sebagai berikut (dalam juta rupiah):

Unit Organisasi Eselon II	Pagu Pengadaan	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total Paket		Persentase Penayangan
		Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	
BHOSDM	5.956,86	74	3,234.83	41	2,789.12	0	0.00	115	6,023.95	101.13%
BHU	65.286,73	160	58,729.46	135	6,171.23	5	108.63	300	65,009.32	99.58%
BPKeu	3.683,34	68	3,479.47	62	431.02	0	0.00	130	3,910.49	106.17%
D1.1	18.754,38	6	5,956.99	27	12,447.39	4	424.40	37	18,828.78	100.40%
D1.2	2.318,73	0	0.00	9	180.67	43	2,138.06	52	2,318.73	100.00%
D1.3	10.552,03	0	0.00	11	8,791.19	2	108.40	13	8,899.59	84.34%
D2.1	4.831,49	80	2,874.22	31	1,961.02	0	0.00	111	4,835.24	100.08%
D2.2	14.831,84	69	13,231.85	10	2,087.79	0	0.00	79	15,319.64	103.29%
D2.3	18.269,98	41	3,883.21	35	11,681.17	2	2,699.00	78	18,263.38	99.96%
D3.1	3.969,79	0	0.00	9	1,764.17	41	2,205.62	50	3,969.79	100.00%
D3.3	3.819,47	50	2,304.33	21	1,515.14	0	0.00	71	3,819.47	100.00%
D4.1	3.229,25	24	1,265.56	27	775.74	42	1,442.49	93	3,483.80	107.88%
D4.2	18.663,98	15	859.57	9	3,212.58	122	15,188.90	146	19,261.05	103.20%
D4.3	2.101,11	36	1,447.06	13	651.82	0	0.00	49	2,098.88	99.89%
INSPEKTORAT	1.000,00	17	511.51	10	345.41	2	143.08	29	1,000.00	100.00%
PPSDM PBJ	9.806,99	0	0.00	18	1,721.49	49	2,190.41	67	3,911.89	100.00%
PUSDATIN	3.911,89	122	9,450.45	47	356.54	0	0.00	169	9,806.99	100.00%
TOTAL	190,987.84	762	107.228,51	515	56.883,46	312	26.648,99	1589	190.760,97	99,88%

Persentase Penayangan Tidak 100%

Rata-rata persentase penayangan sebesar 99,88% dikarenakan masih terdapat unit organisasi yang melakukan proses revisi menayangkan paket pengadaan. Selisih pagu pengadaan dengan penayangan pada aplikasi SiRUP adalah sebesar Rp226.869.000.

1.3 PELAPORAN EKSTERNAL

1.3.1 Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) SMART Kementerian Keuangan

Aplikasi SMART DJA merupakan sebuah aplikasi milik Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L. Aplikasi ini menampilkan hasil nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Kementerian/Lembaga dari level Satker, Unit Eselon I hingga level Kementerian/Lembaga. Nilai EKA ini akan digunakan sebagai salah satu indikator pemberian penghargaan dan/atau sanksi atas kinerja anggaran Kementerian/Lembaga.

Pada bulan Mei 2024 telah dilakukan pengisian dan assesment Rincian Output (RO) pada aplikasi SMART DJA dimana saat ini 70 RO telah dikonfirmasi oleh DJA sebagaimana terdapat pada tampilan berikut:

Assessment RO

Periode Assessment dibuka tanggal 11 s.d 31 Januari
 Setelah tanggal 31 Januari, periode assessment berakhir dan akan ditutup
 Perubahan dapat dilakukan ketika ada penambahan RO dan perubahan satuan RO di unit eselon I tersebut

70 RO Approved 0 RO Processed 0 RO Rejected

Cara Pengisian Download Excel

No.	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Status Konfirmasi	Aksi	Tanggal Update	Histori
							KL DJA			
1	C2 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 6319 Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa AAC Peraturan Pemerintah 131 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1,0000 (RPP)	Statis	Otomatis	Maximize	Stabilized	✓ ✓		2024-01-30 14:15:29	
2	C2 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 6319 Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa AAD Peraturan Presiden 131 Rancangan Peraturan Presiden tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1,0000 (R.Preses)	Statis	Otomatis	Maximize	Stabilized	✓ ✓		2024-01-30 14:15:31	
3	C2 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 6319 Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	2,0000 (Rancangan)	Statis	Tahapan	Maximize	Stabilized	✓ ✓		2024-01-30 14:15:31	

Gambar 3. 1 Tampilan Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan pada Menu Assessment RO

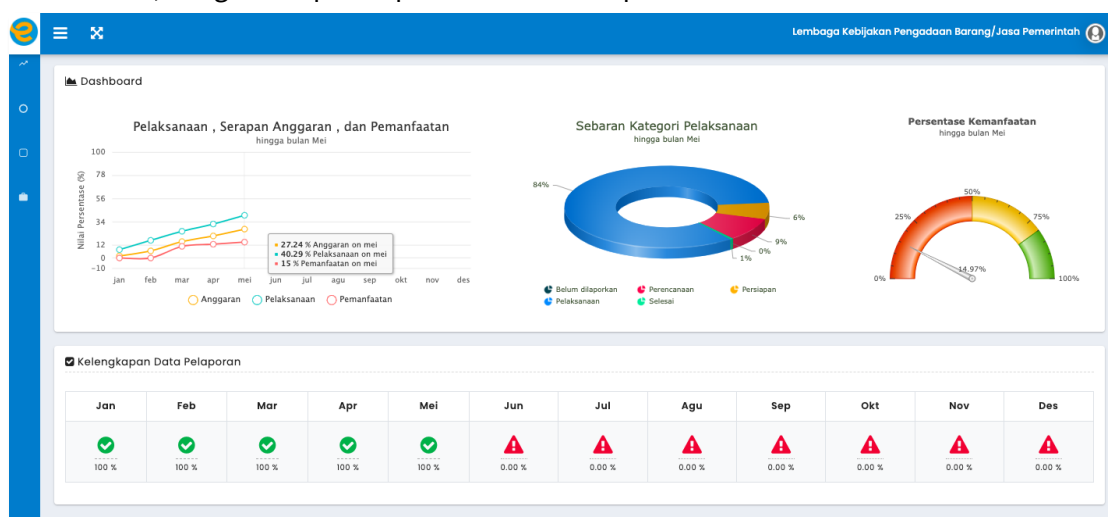
Sampai dengan saat ini NKA LKPP per Mei 2024 belum dapat diinformasikan dikarenakan aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2024.

1.3.2 Pelaporan Kinerja pada E-Monev BAPPENAS

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga perlu melaksanakan pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev Bappenas.

Pengumpulan data pada aplikasi ini adalah rutin setiap bulannya. Setiap K/L/PD diharapkan dapat melaporkan kinerjanya melalui e-monev bappenas setiap bulan. Petunjuk pengisian e-monev bappenas dapat dilihat melalui tautan sebagai berikut: https://emonev.bappenas.go.id/fe/panduan/2021/Pedoman-eMonev_2021_v1_19032021.pdf.

LKPP telah melaporkan kinerja pada e-monev Bappenas untuk periode kinerja Januari s.d Mei 2024, dengan tampilan aplikasi e-monev seperti dibawah ini.



Gambar 3. 2 Tampilan Aplikasi E-Monev Bappenas

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI

2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan (BPKeu) memiliki 3 indikator Sasaran Kegiatan, 4 Rincian Output, dan 9 Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi /Progres
1	8.4 - Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran	Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Predikat: Sangat Baik	Progres: 42%
		Indeks maturitas SPIP	Predikat: Terdefinisi	Progres: 42%
		Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Predikat: Baik	Progres: 41,67%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 41,67%
2.	955-Layanan Manajemen Keuangan	17 Dokumen	Progres: 41,67%
3.	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7 Dokumen	Progres: 37%
4.	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	Progres: 37%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan Mei 2024 adalah 39,34%.

3. Komponen

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki 9 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Mei 2024 adalah 39,96%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar Rp57.481.916.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024, penyerapan per jenis belanja pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	53.798.579.000	24.377.917.315	45.31%	29.420.661.685
52 Belanja Barang	3.683.337.000	1.169.928.770	31.76%	2.513.408.230
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	57.481.916.000	25.547.846.085	44.45%	31.934.069.915

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BPKeu di bulan Mei 2024 adalah sebagai berikut:

1. Nilai IKPA pada bulan Mei yaitu sebesar 94,61 yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan April yaitu sebesar 93,03 (setelah dilakukan koreksi ulang oleh Kementerian Keuangan).
2. Pada bulan Mei 2024, realisasi anggaran BPKeu (parsial) sebesar Rp.167.701.887. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp.402.283.558 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp234.581.671 atau -58,31%.
3. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) BPKeu adalah 106,17%. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP melebihi pagu pengadaan.
4. Pada Indikator Rincian Output Layanan Perencanaan dan Penganggaran Perlu adanya koordinasi lebih lanjut terkait pembagian tugas antara Telkom dan LKPP dalam rangka Renja 2025
5. Pada indikator komponen Evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terdapat permasalahan yaitu aplikasi penilaian mandiri SPIP dari BPKP masih banyak eror sehingga menghambat pelaksanaan persiapan penilaian mandiri.
6. Pada indikator komponen Penyusunan Anggaran terdapat permasalahan Transisi KPA yang mempengaruhi secara administratif proses revisi.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

1. Guna tetap meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga khususnya dalam penyerapan anggaran, BPKeu mengkoordinasikan seluruh unit organisasi agar terus memperhatikan delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.

2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
6. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
7. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
8. Melakukan koordinasi secara intensif kepada BPKP terkait adanya pembaruan informasi dalam pelaksanaan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi dengan menggunakan aplikasi.

2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM) memiliki 6 indikator sasaran kegiatan, 5 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	8.1-Meningkatnya kualitas deregulasi kebijakan	Indeks kualitas kebijakan	Predikat: Baik	Progres: 35%
		Indeks reformasi hukum	Predikat: Istimewa	Progres: 30%
2.	8.2-Terwujudnya penguatan organisasi, tata laksana, dan koordinasi penerapan reformasi birokrasi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP	100 Persen	Progres: 43,22%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
		Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	Skor: 75	Progres: 44%
3.	8.3-Meningkatnya profesionalitas SDM	Indeks profesionalitas ASN LKPP	Predikat: Sangat Tinggi	Progres: 71,72%
		Indeks sistem merit	Predikat: Sangat Baik	Progres: 49,12%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	957-Layanan Hukum	1 Layanan	Progres: 39,31%
2.	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2 Layanan	Progres: 44%
3.	961-Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	Progres: 43,22%
4.	969-Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	Progres: 44,44%
5.	954-Layanan Manajemen SDM	510 Orang	229 Orang

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia pada bulan Mei 2024 adalah 43,17%.

3. Komponen

Tahun 2024, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia memiliki 12 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Mei 2024 adalah 41,12%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu anggaran BHOSDM TA 2024 adalah sebesar Rp 5.956.861.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHOSDM sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	5.956.861.000	1.701.586.289	28.57%	4.255.274.711
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	5.956.861.000	1.701.586.289	28.57%	4.255.274.711

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHOSDM di bulan Mei 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024, realisasi anggaran BHOSDM (parsial) sebesar Rp349.726.928. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp376.390.908 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp26.663.980 atau -7,08%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) BHOSDM adalah 101,13% yang telah ditayangkan. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP melebihi pagu pengadaan.
3. Masih terdapat indikator sasaran kegiatan yang pencapaian fisiknya perlu ditingkatkan yaitu Indeks kualitas kegiatan dan Indeks reformasi hukum.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada indikator sasaran kegiatan Indeks kualitas kegiatan dan Indeks reformasi hukum.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.
5. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

3.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum (BHU) memiliki 7 indikator sasaran kegiatan, 8 indikator Rincian Output, dan 18 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	8.5-Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Nilai: B	Progres: 0%
		Indeks pelayanan publik	Predikat: Sangat Baik	Progres: 0%
		Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks: Informatif	Progres: 47,92%
2.	8.6-Meningkatnya kualitas pelayanan umum internal	Hasil pengawasan kearsipan	Predikat: Memuaskan	Progres: 50%
		Indeks tata kelola pengadaan	Predikat: Istimewa	Progres: 42%
		Indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan kegiatan pimpinan eselon I	Predikat: Sangat Baik	Progres: 50%
		Indeks kualitas pengelolaan aset	Nilai: 3,05	Progres: 42%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	5 Layanan	Progres: 42.57%
2.	956-Layanan BMN	1 Layanan	Progres: 42%
3.	959-Layanan Protokoler	1 Layanan	Progres: 52.40%
4.	962-Layanan Umum	1 Layanan	Progres: 49,84%
5.	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 61.62%
6.	951-Layanan Sarana Internal	83 Unit	16 Unit
7.	971-Layanan Prasarana Internal	1 Unit	Progres: 0%
8.	974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	Progres: 50%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada bulan Mei 2024 adalah 39,68%.

3. Komponen

Tahun 2024 Biro Hubungan Masyarakat dan Umum memiliki 18 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Mei 2024 adalah 42,84%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu anggaran BHU TA 2024 adalah sebesar Rp 65.286.725.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHU sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	45.875.213.000	13.600.448.458	29.65%	32.274.764.542
53 Belanja Modal	19.411.512.000	423.678.000	2.18%	18.987.834.000
Total	65.286.725.000	14.024.126.458	21.48%	51.262.598.542

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHU di bulan Mei 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024, realisasi anggaran BHU (parsial) sebesar Rp3.967.853.550 Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp3.037.008.172 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp930.845.378 atau 30,65%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) BHU adalah 99,58% yang telah ditayangkan. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP kurang pagu pengadaan.
3. Masih terdapat dua indikator sasaran kegiatan yang belum memiliki progres yaitu Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan Indeks pelayanan publik.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada indikator sasaran kegiatan yang belum memiliki progres yaitu Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan Indeks pelayanan publik.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

5. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.
6. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
7. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

3.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) memiliki 1 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	4.1-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum	4 Rancangan Peraturan	Progres: 28,29%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	111-Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1 RPP	Progres: 6,00%
2.	111-Rancangan Peraturan Presiden tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1 R.Perpres	Progres: 33,00%
3.	111-Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Rancangan Peraturan	Progres: 56,67%
4.	111-Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2 Rekomendasi Kebijakan	Progres: 33,47%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.1 pada bulan Mei 2024 adalah 32,29%.

3. Komponen

Tahun 2024, D1.1 memiliki 12 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Mei 2024 adalah 23,79%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu anggaran D1.1 TA 2024 adalah sebesar Ro18.754.375.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	18.754.375.000	3.048.728.270	16,26%	15.705.646.730
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	18.754.375.000	3.048.728.270	16.26%	15.705.646.730

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.1 di bulan Mei 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024, realisasi anggaran D1.1 (parsial) sebesar Rp1.074.390.188. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp1.307.067.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp232.676.812 atau -17,80%.
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D1.1 adalah 100,40%. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP melebihi pagu pengadaan.
3. Terdapat indikator sasaran kegiatan yang pencapaian fisiknya perlu ditingkatkan yaitu Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum.
4. Pada RO dan komponen dari 6319.AAC.111 - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik sampai dengan saat ini masih dalam tahap perencanaan karena masih menunggu RUU diundangkan dan saat ini fokus untuk sosialisasi RUU.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada indikator sasaran kegiatan Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum dan RO Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
5. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.
6. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
7. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
8. Mengakselerasi kegiatan dan pertanggungjawaban sosialisasi RUU guna meningkatkan nilai penyerapan pada Triwulan II.

3.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2) memiliki 2 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	4.1-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus	3 Dokumen	Progres: 40,00%
		Jumlah pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha, BLU/BLUD	3 Dokumen	Progres: 43,00%
		Badan Hukum Publik dan Desa		

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	125-Pedoman/Model Dokumen KSO BLUD dan Kerjasama BUMD	2 NSPK	Progres: 40,00%

2.	124-Model Dokumen PBJ Khusus	3 NSPK	Progres: 40,00%
3.	123-Instansi/Proyek yang Mendapat Pendampingan dalam PBJ Khusus	14 Lembaga	3 Lembaga

Rata-rata progres Rincian Ouput (RO) D1.2 pada bulan Mei 2024 adalah 41,00%.

3. Komponen

Tahun 2024, D1.2 memiliki 9 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Mei 2024 adalah 43,78%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu D1.2 TA 2024 adalah sebesar Rp2.318.730.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.318.730.000	777.783.125	33,54%	1.540.946.875
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	2.318.730.000	777.783.125	33,54%	1.540.946.875

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.2 di bulan Mei 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024, realisasi anggaran D1.2 (parsial) sebesar Rp277.144.913. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp235.415.000 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp41.729.913 atau 17,73%.
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D1.2 adalah 100% yang telah ditayangkan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.
5. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

3.6 DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional (D1.3) memiliki 3 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	1.1-Meningkatnya jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	397 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha
2.	4.1-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah rekomendasi kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kerjasama Internasional	4 Dokumen	Progres: 31,00%
		Jumlah rekomendasi kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJP	2 NSPK	Progres: 24,00%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	132-Pelaku UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	4334 UMKM	1957 UMKM
2.	131-Kerjasama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional	3 Kesepakatan	1 Kesepakatan
3.	131-NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5 NSPK	Progres: 24,00%
4.	131-NSPK Pengadaan Barang/Jasa dalam Kerangka Kerjasama Internasional	2 NSPK	Progres: 30,00%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.3 pada bulan Mei 2024 adalah 31,25%.

3. Komponen

Tahun 2024, D1.3 memiliki 11 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Mei 2024 adalah 28,82%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu D1.3 TA 2024 adalah sebesar Rp10.552.028.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	10.552.028.000	2.270.814.962	21,52%	8.281.213.038
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	10.552.028.000	2.270.814.962	21,52%	8.281.213.038

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.3 di bulan Mei 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024, realisasi anggaran D1.3 (parsial) sebesar Rp395.354.806. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp2.227.458.783 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp1.832.103.977 atau -82,25%.
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D1.3 adalah 84,34%. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terdapat indikator sasaran kegiatan yang pencapaian fisiknya perlu ditingkatkan yaitu Jumlah rekomendasi kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kerjasama Internasional

dan Jumlah rekomendasi kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJP.

4. Pada RO 6319.AFA.132 - NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat kendala berupa banyaknya permintaan kegiatan lain dari internal dan eksternal LKPP, sehingga SDM yang mengerjakan fokus pada kegiatan tersebut.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada indikator sasaran kegiatan yaitu Jumlah rekomendasi kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kerjasama Internasional dan Jumlah rekomendasi kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJP. Serta pada RO NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
5. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.
6. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
7. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

2.7 DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan (D2.1) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	5.1-Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Jumlah segmen integrasi sistem informasi rencana umum pengadaan dengan sistem informasi lainnya	2 Segmen	Progres: 54 Persen
		Jumlah segmen integrasi sistem informasi monitoring dan evaluasi pengadaan dengan sistem lainnya	3 Segmen	Progres: 35 Persen
		Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan	624 K/L/Pemda	529 K/L/Pemda
2.	5.2-Terselenggaranya monitoring dan evaluasi PBJ	Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah	80 Persen	Progres: 10 Persen

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	211-Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 54 Persen
2.	212-Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 35 Persen
3.	211-Roadmap IT LKPP 2025-2029	1 Dokumen	Progres: 17 Persen
4.	211-Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP	2 Laporan	Progres: 40 Persen

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.1 pada bulan Mei 2024 adalah 36,50%.

3. Komponen

Tahun 2024, D2.1 memiliki 11 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Mei 2024 adalah 38,27%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu anggaran D2.1 TA 2024 adalah sebesar Rp4,831,489,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	4,831,489,000	740.164.861	15.32%	4.091.324.139
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	4,831,489,000	740.164.861	15.32%	4.091.324.139

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.1 di bulan Mei 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024, realisasi penyerapan anggaran D2.1 (parsial) adalah sebesar Rp294.840.000. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp237.529.600 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp57.310.400 atau 24,13%
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.1 adalah 100,08% yang telah ditayangkan. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum seluruhnya diinput pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terdapat indikator sasaran kegiatan yang pencapaian fisiknya perlu ditingkatkan yaitu indikator Sasaran Kegiatan Jumlah segmen integrasi sistem informasi monitoring dan evaluasi pengadaan dengan sistem lainnya, indikator Sasaran Kegiatan Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah, RO Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi, dan RO Roadmap IT LKPP 2025-2029.
4. Terdapat 2 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu:
 - a. Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi.
 - b. Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Perencanaan Transformasi. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
5. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada indikator Sasaran Kegiatan Jumlah segmen integrasi sistem informasi monitoring dan evaluasi pengadaan dengan sistem lainnya, indikator Sasaran Kegiatan Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa

pemerintah, RO Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi, dan RO Roadmap IT LKPP 2025-2029.

2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasa terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
5. Mendorong kegiatan sosialisasi kepada seluruh K/L/Pemda untuk dapat disiplin dalam melakukan input rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP.
6. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.
7. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.

2.8 DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Sistem Pengadaan Digital (D2.2) memiliki 5 indikator Sasaran Kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 5 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	5.1-Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat	450 LPSE	356 LPSE
		Jumlah segmen integrasi sistem informasi pengadaan digital dengan sistem informasi lainnya	3 Segmen	Progres: 20%
		Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan non e-purchasing	450 K/L/Pemda	Progres: 20%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
2.	5.3-Terwujudnya tata kelola sistem informasi pengadaan digital yang andal	Jumlah LPSE yang memenuhi maturitas tata kelola LPSE	273 LPSE	247 LPSE
		Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna sistem informasi pengadaan digital	100 Persen	Progres: 42%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	231-SPSE Terpusat	450 Layanan	356 Layanan
2.	234-Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Memiliki Maturitas Tata Kelola	273 Unit Kerja	247 Unit Kerja

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.2 pada bulan Mei 2024 adalah 32,6%.

3. Komponen

Tahun 2024, D2.2 memiliki 8 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Mei 2024 adalah 33,84%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu anggaran D2.2 TA 2024 adalah sebesar Rp14,831,835,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D2.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	14.831.835.000	6.010.368.080	40.52%	8.821.466.920
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	14.831.835.000	6.010.368.080	40.52%	8.821.466.920

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.2 di bulan Mei 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024, realisasi anggaran D2.2 (parsial) sebesar Rp558.986.953 Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp378.108.955 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp180.877.998 atau 47,84%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.2 adalah 100.08% telah ditayangkan. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP melebihi pagu pengadaan.
3. Pada indikator Sasaran Kegiatan Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat, terdapat beberapa permasalahan:
 - 1) Terdapat beberapa K/L/Pemda yang masih belum menggunakan *service-service* dari SPSE terpusat;
 - 2) Kurangnya komitmen dari beberapa LPSE untuk mengimplementasi aplikasi SPSE Terpusat.
 - 3) Koordinasi dalam menjalin kerja sama dengan *stakeholder* dalam proses integrasi SPSE Terpusat. Beberapa *stakeholder* antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
 - 4) Mendorong pemenuhan standarisasi LPSE
 - 5) Sudah tidak adanya anggaran konsultan pada tahun 2024
 - 6) Terbatasnya SDM
4. Pada indikator Sasaran Kegiatan "Jumlah segmen integrasi sistem informasi pengadaan digital dengan sistem informasi lainnya" terdapat kendala koordinasi dalam menjalin kerjasama dengan instansi terkait yang mendukung tercapainya Renstra.
5. Pada indikator Sasaran Kegiatan "Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan non e-purchasing", terdapat kendala yaitu kebergantungan pada kesediaan K/L/Pemda menggunakan sistem informasi pengadaan non e-purchasing dalam PBJP.
6. Pada RO "Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Memiliki Maturitas Tata Kelola", masih terdapat LPSE yang terkendala infrastruktur untuk memenuhi 17 standar.
7. Pada Komponen Penguatan Kapasitas Infrastruktur dan Keamanan Informasi terdapat permasalahan yaitu Tahap pertama pembukaan rekrutmen belum ada yang sesuai kualifikasi.
8. Pada Komponen Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Standarisasi terdapat permasalahan beberapa LPSE peserta Percepatan Standarisasi masih ada yang dibawah 12 standar

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:

- a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.
 5. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
 6. Terhadap indikator Sasaran Kegiatan Jumlah segmen integrasi sistem informasi pengadaan digital dengan sistem informasi lainnya, agar meningkatkan koordinasi yang lebih baik dan melaporkan kepada pimpinan.
 7. Terhadap indikator Sasaran Kegiatan Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan non e-purchasing, agar dilakukan pendekatan yang persuasif terhadap K/L/Pemda yang belum menggunakan sistem informasi pengadaan non e-purchasing dalam PBJP.
 8. Terhadap RO-Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Memiliki Maturitas Tata Kelola, agar dapat dilakukan komunikasi yang intensif untuk mengidentifikasi kendala infrastruktur apa saja yang terjadi dan memberikan alternatif solusi pada LPSE tersebut.
 9. Jika dalam batas waktu yang telah ditetapkan belum terdapat calon pegawai yang memenuhi kualifikasi maka perlu dilakukan rewiu terhadap persyaratan dan/atau memperluas jangkauan informasi pembukaan rekrutmen diberbagai media informasi elektronik/sosial.
 10. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.

2.9 DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pasar Digital Pengadaan (D2.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	2.1-Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada	Jumlah PDN yang tayang pada Katalog Elektronik	10.000.000 PDN	6.890.974 PDN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
	marketplace pengadaan pemerintah	Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik	4.500.000 Produk UMK-K	6.441.318 Produk UMK-K
2.	5.1-Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya	1 Segmen	4 Segmen
		Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing	450 K/L/Pemda	624 K/L/Pemda

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	221-Pedoman Sistem Katalog dan E-Purchasing	2 Pedoman	1 Pedoman
2.	221-Produk yang Masuk E-Catalogue	10.000.000 Produk	6.890.974 Produk
3.	221-Sistem E-Purchasing Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 40%
4.	221-Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik	1 Laporan	Progres: 41,60%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.3 pada bulan Mei 2024 adalah 39,02%.

3. Komponen

Tahun 2024 D2.3 memiliki 12 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Mei 2024 adalah 37,72%

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu anggaran D2.3 TA 2024 adalah sebesar Rp18,269,975,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	18.269.975.000	5.231.176.010	28.78%	12.942.798.990
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	18.269.975.000	5.231.176.010	28.78%	12.942.798.990

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.3 di bulan Mei 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024 realisasi penyerapan anggaran D2.3 (parsial) adalah sebesar Rp1.142.820.741, realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp1.420.700.500 sehingga memiliki deviasi -Rp277.879.759 atau -19,56%.
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.3 adalah 99,96% yang telah ditayangkan. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum seluruhnya diinput pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Masih terdapat kendala yang sama seperti pada bulan-bulan sebelumnya, antara lain:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan "Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah" terdapat kendala pada proses penarikan data pada Dashboard Monev Katalog yang seringkali terjadi perbedaan data dikarenakan sistem/server yang berat.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan "Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik", pada Indikator Sasaran Kegiatan "Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya" yang status saat ini masih menunggu MoU/PKS dengan kemenESDM terkait integrasi dengan SHE, serta menunggu MoU/PKS dengan Kementerian Agama terkait integrasi data Sertifikat Halal.
 - c. Pada RO "Sistem E-Purchasing Terintegrasi", terdapat kendala bahwa perlu menunggu MoU/PKS dengan KemenESDM terkait integrasi data SHE, MoU/PKS dengan Kementerian Agama terkait integrasi data sertifikat halal serta penggunaan *e-purchasing* oleh non K/L/PD (BUMN/BUMD/BLU/BLUD/BUMDes/BUMDesma).
4. Terdapat kinerja yang realisasinya sampai dengan bulan Mei 2024 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. SK "Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah", indikator Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik yang telah terealisasi 6.441.318 produk UMK-K, dari target sebesar 4.500.000 produk UMK-K,
 - b. SK "Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik" pada indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya telah terealisasi sebanyak 4 Segmen, dari target sebanyak 1 Segmen,
 - 2) Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing telah terealisasi sebanyak 624 K/L/Pemda, dari target sebanyak 450 K/L/Pemda
5. Terdapat 2 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu:
 - a. Produk yang Masuk *e-Catalogue*; dan
 - b. Sistem *e-Purchasing* Terintegrasi

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.
5. Perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasa terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
6. Terkait dengan Sasaran Kegiatan "Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah" dimana masih terkendala dalam proses *generate*/penarikan data yang relatif membutuhkan waktu, diharapkan untuk selalu berkoordinasi dengan tim pengelola aplikasi untuk dapat menindaklanjuti baik dari sisi infrastruktur maupun sistem yang digunakan.
7. Terhadap Indikator Sasaran Kegiatan "Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya", unit organisasi diharapkan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengakselerasi penyelesaian MoU/Perjanjian Kerja Sama.
8. Terhadap RO Sistem e-Purchasing Terintegrasi, agar senantiasa berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka akselerasi penyusunan MoU/Perjanjian Kerja Sama yang dibutuhkan untuk pelaksanaan integrasi sistem serta koordinasi dengan *stakeholder* yang terkait dengan penyusunan aturan terbaru mengenai penggunaan *e-purchasing* oleh non K/L/PD.
9. Terkait dengan 3 indikator Sasaran Kinerja yang realisasinya telah melebihi target, agar menginformasikan dan berkoordinasi secara resmi melalui nota dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas target yang telah tercapai di bulan Mei 2024. Mengingat bahwa capaian ini akan menjadi catatan oleh BAPPENAS pada saat rapat monitoring dan evaluasi di tingkat Kementerian/Lembaga.
10. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.

2.10 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (D3.1) memiliki 3 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	6.1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	7.600 Orang	8.522 Orang
		Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK	7.975 Orang	12.892 Orang
2.	6.2-Meningkatnya kapabilitas UKPBJ	Persentase pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ	70 Persen	Progres: 69.89%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	311-Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Rekomendasi Kebijakan	Progres: 50.00%
2.	311-SDM JF PPBJ	7.600 Orang	8.688 Orang
3.	311-UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3	382 Lembaga	375 Lembaga

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D3.1 pada bulan Mei 2024 adalah 50%.

3. Komponen

Tahun 2024, D3.1 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output dan rata-rata progres komponen pada bulan Mei 2024 adalah 46,11%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu anggaran D3.1 TA 2024 adalah sebesar Rp3,969,791,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	Rp3,969,791,000	Rp870.546.796	21.93%	Rp3.099.244.204
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	Rp3,969,791,00	Rp870.546.796	21.93%	Rp3.099.244.204

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.1 di bulan Mei 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024, realisasi anggaran D3.1 (parsial) sebesar Rp226.907.476. Realisasi ini lebih besar dari RPD sebesar Rp216.577.779 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp10.329.697 atau 4,77%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D3.1 adalah 100% telah ditayangkan.
3. Masih terdapat beberapa permasalahan pada RO Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Adanya perubahan ruang lingkup kuisisioner agar kuisisioner diarahkan pada pengumpulan data dampak pelatihan standar kompetensi PBJ dan Penyusunan dilaksanakan sambil menunggu finalisasi peraturan induk.
4. Terdapat 2 indikator Sasaran Kinerja yaitu Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda dan Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK serta 1 Rincian Output pada SDM JF PPBJ yang realisasinya telah melebihi target.
5. Terdapat 1 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3).

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu;
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

3. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.
4. Terkait permasalahan pada RO Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar kuisioner segera diarahkan pada pengumpulan data dampak pelatihan standar kompetensi PBJ dan melakukan penyusunan sambil menunggu finalisasi peraturan induk.
5. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
6. Terkait dengan 2 indikator Sasaran Kinerja yaitu Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda dan Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK serta 1 Rincian Output pada SDM JF PPBJ yang realisasinya telah melebihi target, agar menginformasikan dan berkoordinasi secara resmi melalui nota dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas target yang telah tercapai di bulan Mei 2024. Mengingat bahwa capaian ini akan menjadi catatan oleh BAPPENAS pada saat rapat monitoring dan evaluasi di tingkat Kementerian/Lembaga.
7. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.

2.11 DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Sertifikasi Profesi (D3.3) memiliki 1 indikator sasaran kegiatan, 6 indikator Rincian Output, dan 17 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	6.1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah SDM PBJ yang mengikuti sertifikasi kompetensi	5.480 Orang	3.213 Orang
		Keterandalan sistem sertifikasi kompetensi	92%	92%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	331-Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar	34 Lembaga	11 Lembaga
2.	331-Asesor yang Mendapatkan Pembinaan	75 Orang	Progres: 30%
3.	331-Peserta Sertifikasi SDM PBJ	5.480 Orang	3.213 Orang
4.	331-Pedoman Sertifikasi PBJP	1 Pedoman	Progres: 35%
5.	332-Materi Uji Sertifikasi PBJP	20 NSPK	10 NSPK

6.	331-Sarana Sertifikasi PBJP	196 Unit	80 Unit
----	-----------------------------	----------	---------

Rata-rata progres Rincian Ouput (RO) D3.3 pada bulan Mei 2024 adalah 42,55%.

3. Komponen

Tahun 2024 D3.3 memiliki 18 Komponen dari 6 Rincian Output dan rata-rata progres komponen pada bulan Mei 2024 adalah 45,75%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu anggaran D3.3 TA 2024 adalah sebesar Rp3.819.469.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.819.469.000	1.106.306.272	28.96%	2.713.162.728
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.819.469.000	1.106.306.272	28.96%	2.713.162.728

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.3 di bulan Mei 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024, realisasi anggaran D3.3 (parsial) sebesar Rp350.163.856. Realisasi ini lebih kecil dari RPD sebesar Rp433.321.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp83.157.144 atau -19.19%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D3.3 adalah 100,13% telah ditayangkan. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP melebihi pagu pengadaan.
3. Terdapat permasalahan pada Rincian Output Sarana Sertifikasi PBJP yaitu:
 - a. Koneksi antar server yang kurang stabil.
 - b. Performa server di PDNS turun yang mengakibatkan server lemot saat diakses.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.
4. Pada RO Sarana Sertifikasi PBJP yaitu: Meningkatkan koordinasi dengan Pusdatin sebagai pengelola server PPSDM untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Koneksi antar server yang kurang stabil.

2.12 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat (D4.1) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	3.1- Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	68 K/L	9 K/L
		Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	60 K/L	9 K/L
2.	7.1-Meningkatnya clearing house, konsolidasi, dan probity advice di K/L	Jumlah K/L yang menyelenggarakan clearing house yang efektif	50 K/L	44 K/L
		Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	16 K/L	6 K/L

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	411-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	68 K/L	12 K/L

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/ Progres
2.	412-Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House	20 K/L	9 K/L
3.	413-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi	16 K/L	6 K/L

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.1 pada bulan Mei 2024 adalah 41,00%.

3. Komponen

Tahun 2024, D4.1 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen sebesar 41,00%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu anggaran D4.1 TA 2024 adalah sebesar Rp 3.229.245.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.229.245.000	593.876.389	18.39%	2.635.368.611
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.229.245.000	593.876.389	18.39%	2.635.368.611

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.1 di bulan Mei 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024, realisasi anggaran D4.1 (parsial) sebesar Rp362.769.000,-. Realisasi ini lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp732.464.000,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp369.695.000 atau -50,47%.
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D1.2 adalah 107,88% yang telah ditayangkan. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum seluruhnya diinput pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran tetap dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Menyusun strategi percepatan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan
5. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
6. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

2.13 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (D4.2) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	3.2-Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	530 Pemda	497 Pemda
		Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	538 Pemda	503 Pemda
2.		Jumlah Pemda yang menyelenggarakan	100 Pemda	88 Pemda

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
	7.2-Meningkatnya <i>clearing house</i> , konsolidasi, dan <i>probity advice</i> di Pemda	<i>clearing house</i> yang efektif		
		Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau <i>probity advice</i>	50 Pemda	19 Pemda

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	421-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	538 Pemda	372 Pemda
2.	422- Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan <i>Clearing House</i>	100 Pemda	86 Pemda
3.	423-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan <i>Probity Advice</i> , Konsolidasi dan/atau Advokasi	50 Pemda	19 Pemda

Rata-rata progres Rincian Ouput (RO) D4.2 pada bulan Mei 2024 46,82%.

3. Komponen

Tahun 2024, D4.2 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 38,22%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu anggaran D4.2 TA 2024 adalah sebesar Rp 18.663.984.000,. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	18.663.984.000	1.541.584.876	8.26%	17.122.399.124
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	18.663.984.000	1.541.584.876	8.26%	17.122.399.124

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.2 di bulan Mei 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024, realisasi anggaran D4.2 (parsial) sebesar Rp916.564.414,-. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp1.020.549.559 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp103.985.145 atau -10,19%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D4.2 adalah 103,20% yang telah ditayangkan. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum seluruhnya diinput pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terdapat permasalahan yang sama pada indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN”, indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K” bahwa hingga bulan Mei 2024, Data capaian UMK pada Pemda tergolong fluktuatif, karena pembagiannya merupakan total transaksi pengadaan melalui Penyedia pada bulan tersebut, sehingga ada kemungkinan nilai capaian PDN nya menurun/meningkat dari bulan sebelumnya. Belanja UMK-K dan PDN akan dapat dihitung nilai finalnya pada triwulan IV.
4. Terdapat permasalahan pada Indikator Rincian Output “Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN” dan “Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ” adalah bahwa kegiatan advokasi yang dilaksanakan bergantung dari jumlah pemda yang mengajukan permintaan konsultasi baik secara daring, luring, maupun melalui surat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan LKPP biasanya menyasar kepada 1 pemda di setiap kegiatan, tetapi dalam beberapa kegiatan, pemda yang diundang dalam jumlah banyak, sehingga target akhir tahun akan tetap terpenuhi.
5. Terdapat Permasalahan pada indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Pemda yang menyelenggarakan *Clearing House* yang efektif” dan Rincian Output “Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan *Clearing House*”, antara lain adalah:
 - a. Belum seluruh Pemda memperoleh informasi mengenai forum *Clearing House*, baik tata cara pembentukan, anggota yang terlibat, serta honorarium yang didapat.
 - b. Pemda masih belum terdorong untuk membentuk *Clearing House* karena beberapa faktor, seperti anggaran, manfaat bagi personil, dan merasa bahwa penyelesaian permasalahan pengadaan harus melalui LKPP.
6. Terdapat permasalahan pada indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau *Probitly Advice*” dan indikator Rincian Output “Pemerintah Daerah yang Mendapatkan *Probitly Advice*, Konsolidasi dan/atau Advokasi” yaitu:
 - a. Dalam penyusunan perencanaan pengadaan, masih terdapat Pemda yang belum mempertimbangkan untuk melakukan konsolidasi pengadaan.
 - b. Belum adanya pemetaan mendalam terhadap komoditas potensial antar OPD yang dapat dikonsolidasikan.
 - c. Adanya kendala intervensi non-teknis dalam pelaksanaan konsolidasi Pemda, terutama jika melihat potensi lingkup konsolidasi yang luas baik di tingkat kota/kabupaten atau provinsi.
 - d. Terdapat Pemda yang belum mengetahui adanya layanan *Probitly Advice*, atau mengetahui syarat-syarat sebuah paket diberikan *Probitly Advice* oleh LKPP.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.
5. Terhadap indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN”, “Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K”, dan Rincian Output “Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN” dan “Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ” dapat dilakukan antara lain:
 - a. Melakukan pemetaan serta monitoring secara berkala kepada Pemerintah Daerah yang belum menerapkan belanja PDN dan UMK sesuai dengan kriteria minimalnya.
 - b. Mendorong pencatatan belanja pengadaan secara berkala kepada Pemerintah Daerah terutama untuk belanja pengadaan PDN dan UMK melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/kegiatan sejenis lainnya.
 - c. Mendorong peningkatan jumlah dan kualitas produk PDN dan UMK kepada pemangku kepentingan seperti Kemenperin, Kemendag, Kemenkop UKM, dan berkoordinasi dengan direktorat terkait di LKPP.
6. Terhadap Indikator Rincian Output “Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ”, agar dapat menyusun jadwal sosialisasi serta melaksanakan kegiatan sosialisasi berdasarkan jadwal dan pemetaan terhadap Pemerintah Daerah yang belum menerapkan belanja PDN dan UMK sesuai dengan kriteria minimal.
7. Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan *awareness* kepada Pemerintah Daerah, seperti pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis/kegiatan sejenis, yang di dalamnya melibatkan Pemerintah Daerah yang telah berhasil terkait:
 - a. Penyelenggaraan *Clearing House* yang efektif;
 - b. Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan; dan
 - c. Layanan *probity advice* oleh LKPP beserta persyaratan yang harus dipenuhi.
8. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.

9. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

2.14 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (D4.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 5 indikator Rincian Output, dan 14 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	7.3-Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	Persentase perkara/permasalahan PBJP yang terlayani	100 Persen	Progres: 45%
		Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan LPS	50 /K/L/Pemda	55 K/L/Pemda
		Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki Sistem Pengaduan dan ditingkatkan kapasitasnya	65 APIP K/L/Pemda	40 APIP K/L/Pemda
		Jumlah Provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli yang optimal	15 Provinsi	10 Provinsi

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	431-Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibentuk	2 Orang	Progres: 60%
2.	432-Personil Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang Dibentuk	50 Orang	Progres: 55%
3.	431-Perkara Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani	360 Perkara	172 Perkara
4.	432-Perkara Permasalahan Kontrak PBJP yang Terlayani LPS	25 Perkara	5 Perkara
5.	431-Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak	9 Lembaga	2 Lembaga

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.3 pada bulan Mei 2024 adalah 47,6%.

3. Komponen

Tahun 2024, D4.3 memiliki 14 Komponen dari 5 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 54,07%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu anggaran D4.3 TA 2024 adalah sebesar Rp 2.101.112.000,-. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.101.112.000	347.561.492	16.54%	1.753.550.508,00
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	2.101.112.000	297.085.909	14,14%	1.804.026.091

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.3 di bulan Mei 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024, realisasi anggaran D4.3 (parsial) sebesar Rp50.475.583,-. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp80.285.228,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp29.809.645 atau -37,13%%.
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D1.2 adalah 99,89% yang telah ditayangkan. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum seluruhnya diinput pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan

- c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.
5. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
6. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

2.15 INSPEKTORAT

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024 Inspektorat memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 1 indikator Rincian Output, dan 4 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	8.8-Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi	Level kapabilitas Inspektorat LKPP	Level 3	Progres: 39.73%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP	85 Persen	Progres: 22.33%
		Survei persepsi kepuasan Unit Organisasi terhadap pengawasan internal	Predikat: Sangat Memuaskan	Progres: 36.87%
		Nilai kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Predikat: Sangat Baik	Progres: 35%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	965-Layanan Audit Internal	12 Dokumen	Progres: 32%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Inspektorat pada bulan Mei 2024 adalah 36%.

3. Komponen

Tahun 2024, Inspektorat memiliki 4 Komponen dari 1 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 47.83%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu anggaran Inspektorat TA 2024 adalah sebesar Rp1.000.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Inspektorat sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.000.000.000	347.810.540	34.78%	652.189.460
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.000.000.000	347.810.540	34.78%	652.189.460

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Terdapat beberapa catatan pada Inspektorat di bulan Mei 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024, realisasi anggaran Inspektorat (parsial) sebesar Rp33.270.017. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp Rp58.597.003. sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp25.326.986 atau -43.22%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Inspektorat telah 100% ditayangkan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.

5. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

2.16 PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa (Puslat SDM PBJ) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 7 indikator Rincian Output, dan 19 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	6.1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah peserta pelatihan fungsional pengelola PBJ dan peserta pelatihan teknis kompetensi PBJ yang terlatih	19.600 Orang	12.370 Orang
		Jumlah peserta pelatihan teknis tematik PBJ yang terlatih	4.250 Orang	3.048 Orang
		Jumlah sumber daya pengelola fungsi PBJ yang lulus sertifikasi kompetensi	12.000 Orang	4.272 Orang
		Persentase peningkatan kualitas pelatihan	85 Persen	75 Persen

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	511-LPPBJ yang Terakreditasi	80 Lembaga	25 Lembaga
2.	511-Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ	7 NSPK	Progres: 40%
3.	512-Pedoman Pelatihan PBJ	3 Pedoman	1 Pedoman
4.	511-Media Pembelajaran Berbasis TIK	5 Paket	Progres: 30%
5.	511-Peserta Pelatihan PBJ Teknis	22.950 Orang	14.338 Orang
6.	512-Peserta Pelatihan PBJ Fungsional	1.400 Orang	623 Orang
7.	512-Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan PBJP	2 Laporan	Progres: 1 Laporan

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Puslat SDM PBJ pada bulan Mei 2024 adalah 37,39%.

3. Komponen

Tahun 2024, Puslat SDM PBJ memiliki 19 Komponen dari 7 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 36,22%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu anggaran Puslat SDM PBJ TA 2024 adalah sebesar Rp3.911.894.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada Puslat PBJ sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.444.686.000	844.401.806	24.51%	2.600.284.194
53 Belanja Modal	467.208.000	-	0%	467.208.000
Total	3.911.894.000	679.781.734	17.38%	3.480.217.328

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdiklat di bulan Mei 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024 realisasi penyerapan anggaran Puslat SDM PBJ (parsial) adalah sebesar Rp164.620.027 realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp339.743.833 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp175.123.761 atau -51,55%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Puslat SDM PBJ telah 101,01% ditayangkan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.

4. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

3.17 PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) memiliki 1 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 8 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	8.7-Terwujudnya layanan data dan sistem informasi yang andal dan responsif	Predikat SPBE	Predikat: Baik	Progres: 42%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	Progres: 42%
2.	963-Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	1 Layanan	Progres: 42%
3.	963-Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	16 Unit	Progres: 42%
4.	963-Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9 Sistem Informasi	Progres: 42%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Pusdatin pada bulan Mei 2024 adalah 42%.

3. Komponen

Tahun 2024, Pusdatin memiliki 9 Komponen dari 4 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 42%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-9, pagu anggaran Pusdatin TA 2024 adalah sebesar Rp9.806.987.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Mei 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Pusdatin sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	6.575.998.000	1.264.530.531	19.23%	5.311.467.469

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
53 Belanja Modal	3.230.989.000	31.500.000	0.97%	3.199.489.000
Total	9.806.987.000	1.296.030.531	13.22%	8.510.956.469

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdatin di bulan Mei 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2024 realisasi penyerapan anggaran Pusdatin (parsial) adalah sebesar Rp787.741.174 realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp365.913.000 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp421.828.174 atau 115,28%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pusdatin telah 100% ditayangkan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mengupayakan tercapainya target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49,2\%$.
5. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
6. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

BAB III KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Mei 2024, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pada tahun 2024, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp244.786.416.000 dan sampai dengan bulan Mei 2024 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp 66.212.923.842 (27,05%) yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	53.798.579.000	24.377.917.315	45.31%	29.420.661.685
52 Belanja Barang	167.782.128.000	41.379.828.527	24.66%	126.402.299.473
53 Belanja Modal	23.205.709.000	455.178.000	1.96%	22.750.531.000
TOTAL	244.786.416.000	66.212.923.842	27.05%	178.573.492.158

2. Pada bulan Mei 2024 realisasi anggaran LKPP (parsial) sebesar Rp15.754.103.989. Realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) LKPP pada bulan Mei 2024 sebesar Rp17.609.933.633. sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp1.855.829.644 atau -10.54%.
3. Unit organisasi yang memiliki deviasi RPD masih dalam ambang batas ($\pm 5\%$) adalah Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (D3.1). sedangkan unit organisasi lainnya memiliki deviasi RPD di luar ambang batas ($\pm 5\%$).
4. Pada tahun 2024 pagu pengadaan LKPP sebesar Rp190.987.837.000 (78.02%). Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP. LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar Rp190.760.968.000 atau sebesar 99.88%. Terdapat Selisih pagu pengadaan dengan penayangan pada aplikasi SiRUP adalah sebesar Rp226.869.000.
5. Dari paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP 29,82% direncanakan dilaksanakan melalui Swakelola dan 70,18% belanja pengadaan direncanakan dilaksanakan melalui Penyedia. Pada alokasi belanja pengadaan melalui Penyedia pada RUP LKPP terdiri atas:
 - a. rencana belanja pengadaan dengan tagging PDN mencapai 92,59%; dan
 - b. rencana belanja pengadaan dengan tagging UMKK sebesar 56,88%.
6. Nilai IKPA LKPP bulan Mei 2024 berdasarkan Aplikasi OMSPAN (spanint.kemenkeu.go.id) adalah sebesar 94,61 yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan April yaitu sebesar 93,03.
7. Terdapat indikator yang realisasinya telah melebihi target. yaitu:
 - a. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik

- b. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-purchasing dengan sistem lainnya
 - c. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing
 - d. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda
 - e. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK
 - f. Indikator Rincian Output - SDM JF PPBJ
8. Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja LKPP, setiap pimpinan unit organisasi agar:
- a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun unit organisasi masing-masing karena akan mempengaruhi nilai IKPA di tingkat lembaga;
 - b. Merencanakan dan mengupayakan percepatan kegiatan serta proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan II sebesar $\geq 49.2\%$ dapat tercapai;
 - c. Meningkatkan pencapaian kinerja fisik pada indikator yang masih perlu ditingkatkan dan masih belum berprogres;
 - d. Mencermati dan segera meng-*update* pengumuman RUP di SiRUP bagi unit organisasi yang penayangan RUP pada aplikasi SiRUP belum sesuai dengan anggaran belanja pengadaannya;
 - e. Meningkatkan realisasi penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah agar paket pengadaan yang telah direncanakan dengan tagging PDN dapat terealisasi seluruhnya;
 - f. Mencermati administrasi dan pelaporan setiap kegiatan pengadaan barang/jasa terlebih yang menggunakan PDN agar dicatatkan pada aplikasi SAKTI dengan sesuai;
 - g. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk memastikan paket pengadaan barang/jasa yang sudah diumumkan dapat segera diproses;
 - h. Memonitor dan memastikan capaian setiap indikator kinerja unit organisasi masing-masing (Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Rincian Output dan komponen);
 - i. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiREMON sebagai media pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap progres serta pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran pada unit organisasinya masing-masing; dan
 - j. Menindaklanjuti rekomendasi unit organisasi masing-masing yang terdapat pada Bab II Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Mei 2024 dan melaporkan progres tindaklanjut melalui Aplikasi SiREMON.

